

# REKONSILIASI ISLAM DAN DEMOKRASI: NARASI POLITIK BENAZIR BHUTTO

*Lukman Santoso*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
email: cak\_luk2005@yahoo.co.id

**Abstract:** *Pakistan, since independence, there are differences of opinion among the Muslims of Pakistan consisting of secularists, moderate Islamists about how should the implementation of the Islamic politics in Pakistan, giving rise to a prolonged political crisis when today. Pakistan's political turmoil unending birth Pakistani women politicians and thinkers, namely Benazir Bhutto. This paper will focus on the study of Benazir Bhutto thinking about the relationship between Islam and democratisation in Pakistan. Based on the results of the study, there are some findings: First, Benazir with thoughts that category substantivist and relatively conflict with Muslim-majority Pakistan (traditionalists and fundamentalists), the ideas in tune with existence, articulation, and a manifestation of Islamic values are intrinsic in the climate modern democratisations. Second, the idea of Benazir is a counter discourse to the idea that idealized which Islam should be the political system. Benazir thinking is in line with the paradigm who saw that Islam does not lay down a standard pattern of the theory of the political system must be organized by the people, except for the values and ethical principles.*

**الملخص:** كانت في باكستان - منذ حرّيتها - خلافات الآراء عند المسلمين بين العلمانيين والمتوسطين والإسلاميين عن كيفية تطبيق السياسة الإسلامية في باكستان حتى أدت إلى النزاع السياسيّ الطويل إلى الآن. وظهرت في هذه الفترة النزاعية مفكّرة وسياسيّة بينزر بوطو. حاولت هذه المقالة التركيز في دراسة أفكارها عن التصالح الإسلامي والديموقراطية في باكستان. حصلت هذه الدراسة على النتائج: أولاً، كانت بينزر بوطو بما لها من أفكار تميل إلى الأصالة وأفكارها متعارضة بأغلبية المسلمين التقاليديين والأصوليين، وكانت أفكارها موافقة بمكانة القيم الإسلامية الأصيلة وتمثيلها وتطبيقها في ضوء الديموقراطية الحديثة. ثانياً إن هذه الأفكار كردّ تجاه الفكرة المؤيّدّة ليكون الإسلام أساساً للدولة. كانت هذه الأفكار تواكب بفكرة أن الإسلام لا يضع نظرية معيّنة لبناء الدولة يعتنقها المسلمون إلا الأسس العامة فقط والقيم فيها.

**Abstrak:** *Pakistan, sejak kemerdekaannya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan kaum muslim Pakistan yang terdiri dari kelompok sekular, moderat dan Islamis tentang bagaimana implementasi Islam politik di Pakistan, sehingga menimbulkan kemelut kekuasaan yang berkepanjangan hingga kini. Di tengah kemelut politik Pakistan yang tidak berkesudahan tersebut lahirlah politisi dan pemikir perempuan Pakistan, yakni Benazir Bhutto. Tulisan ini akan memfokuskan kajian pada pemikiran Benazir Bhutto tentang rekonsiliasi Islam dan demokrasi di Pakistan. Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa temuan, yaitu: Pertama, Benazir dengan pemikirannya yang termasuk kategori substantivistik dan tergolong bertentangan dengan mayoritas muslim Pakistan (tradisionalis dan fundamentalis) ini, gagasannya selaras dengan eksistensi, artikulasi, dan manifestasi nilai-nilai Islam yang instrinsik dalam iklim demokrasi modern. Kedua, gagasan Benazir merupakan counter wacana terhadap pemikiran yang mengidealkan bahwa Islam harus menjadi dasar negara. Pemikiran Benazir ini selaras dengan paradigma yang melihat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori sistem politik yang harus diselenggarakan oleh umatnya, kecuali nilai-nilai dan prinsip-prinsip etisnya.*

**Keywords:** islam, demokrasi, Benazir Bhutto

## PENDAHULUAN

Dalam Islam, ajaran-ajaran tentang masalah kenegaraan hanya bersifat garis besar, sehingga terjadi variasi dan perbedaan pandangan pemikiran ulama tentang hal ini, baik pada masa klasik maupun pada masa kontemporer. Bahkan jika dibandingkan antara pemikiran klasik dengan pemikiran kontemporer, perbedaan ini nampak semakin melebar. Para pemikir politik Islam pada masa klasik dan pertengahan tidak mempersoalkan kedudukan negara dengan agama, apakah terintegrasi atau terpisah, karena dalam kenyataan sistem kekhalifahan mengintegrasikan agama dengan negara. Sementara di era kontemporer tidak demikian. Puncak dari pergumulan itu di era kontemporer muncul ketika terjadinya gerakan revolusi di Turki yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Ataturk pada perang dunia pertama. Runtuhnya otoritas khilafah di Turki setelah kekalahan Islam atas Inggris membawa penderitaan panjang bagi

umat Islam. Keruntuhan tersebut mendapatkan perhatian serius dari seluruh umat Islam, terutama di India yang melatarbelakangi pembentukan gerakan khilafah di tahun 1919.<sup>1</sup>

Gerakan ini dari tahun ke tahun semakin masif melancarkan kampanye anti-Inggris yang saat itu sedang menjajah India. Gerakan ini pulalah yang pada akhirnya mengilhami umat Islam India untuk mewujudkan negara sendiri. Negara tersebut kemudian diberi nama Pakistan.<sup>2</sup> Republik Islam Pakistan,<sup>3</sup> merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim-sunni di wilayah Asia Selatan. Keberadaan Pakistan berkat keberhasilan teori dua bangsa (*Two Teory Nations*) yang dikemukakan oleh Muhammad Ali Jinnah (1876-1949).<sup>4</sup> Pakistan menduduki peringkat kedua dalam negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia setelah Indonesia.<sup>5</sup>

Pakistan lahir didasari atas aspirasi umat Islam India yang menghendaki Islam sebagai *raison d'etre* (tujuan keberadaan). Tetapi sebelum Ali Jinnah sempat mendeterminasikan karakteristik sistem politik negara ideologis ini dan bagaimana hubungannya dengan demokrasi, Ia lebih dulu meninggal.<sup>6</sup> Sehingga masalah tempat dan pengertian tentang

---

<sup>1</sup>Gerakan Anti Inggris yang paling terkenal di India saat itu adalah *All India Khilafat Conference* dengan tokoh utama Muhammad Ali dan Syaukat Ali. Lihat A. Mukti Ali, *Alam Pikiran India dan Pakistan*, Cet. 3 (Bandung: Mizan, 1996), 41–43.

<sup>2</sup>Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat tahunan Liga Muslim yang diadakan di Lahore pada tahun 1940. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet.9 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 197.

<sup>3</sup>Nama Pakistan merupakan sumbangan dari beberapa mahasiswa Muslim India di Cambridge University. Nama Pakistan merupakan reaktualisasi dari Negara baru yang digagas Muhammad Iqbal (1875-1838). Nama ini juga berarti “negeri yang suci”. Lihat Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1989), 57. Lihat juga S.M. Ikram, *Indian Muslims and Partition of India* (USA: Atlantic Publishers & Dist, 1995), 177.

<sup>4</sup>*Two Nation Theory*, atau teori dua bangsa yang dirintis oleh Sayyed Ahmad Khan dan direalisasikan Muhammad Ali Jinnah. Teori tersebut juga menegaskan bahwa umat Islam dan Hindu adalah dua bangsa dengan latar belakang budaya, peradaban, adat, literatur, sejarah dan agama yang berbeda. Lihat Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, 56.

<sup>5</sup>Robert U. Ayres, *Turning Point: The End of the Growth Paradigm* (Publishers: James & James, 1998), 63.

<sup>6</sup>Ditengah kondisi Pakistan sedang berbenah diri untuk mengukuhkan posisinya di kancah politik dunia, pada 11 September 1948 kematian menjemput Ali Jinnah. Liaquat Ali Khan kemudian menggantikan posisi Ali Jinnah, sedangkan Gubernur Jenderal digantikan Khawaza Najimuddin. Lihat Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi, Islam, Demokrasi Dan Barat*, terj. Annisa Rahmalia (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2008), 183.

Islam belum juga terselesaikan. Selisih pendapat dan konfigurasi politik masih terus berlanjut antara kelompok “sekular”, moderat dan kelompok yang ingin melaksanakan sistem politik, ekonomi dan sosial Islam.<sup>7</sup> Salah satu persoalan politik yang juga mengiringi Pakistan di masa awal berdirinya adalah persoalan batas wilayah.<sup>8</sup>

Terjadinya tragedi politik yang berkepanjangan di Pakistan hingga sekarang, menjadikan ruang politik Pakistan sudah sangat rumit untuk diuraikan dalam waktu singkat. Pakistan memang membutuhkan jalan baru bagi proses pendewasaan berpolitik sekaligus berdemokrasi. Peristiwa pembunuhan atas Benazir Bhutto, sebagai tokoh penting dalam konfigurasi politik Pakistan pada 27 Desember 2007, ketika Ia akan kembali ke panggung politik, setelah ayahnya yang juga menjadi martir demokrasi pada 1979.<sup>9</sup> menjadi episode yang tetap aktual dari kekisruhan Politik di Pakistan, dan berlarut-larut hingga kini.

Benazir Bhutto sebagai tokoh sentral di Pakistan, berdasarkan hasil penelitian Ni'matul Husna,<sup>10</sup> memiliki pengaruh besar dalam memperjuangkan hak-hak politik perempuan di Pakistan. Intensitas pemikiran dan kerja keras Benazir dapat memberikan pembaruan baik secara formal maupun nonformal bagi perempuan di Pakistan. Kebebasan secara sosial, politik maupun ekonomi dapat diakses oleh siapapun tanpa adanya diskriminasi gender. Perjuangannya yang tiada henti dapat meruntuhkan kezaliman penguasa tersebut sehingga melahirkan pemerintahan yang demokratis, terutama bagi perempuan yang memiliki kebebasan memilih (*free of choice*) atas dasar hak-haknya yang sama dengan laki-laki.

---

<sup>7</sup>Dalam Undang-undang Dasar Pakistan tahun 1956 nama resmi negara itu adalah “Republik Islam Pakistan”. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet.5 (Jakarta: UI Press, 1993), 228.

<sup>8</sup>Lahirnya Bangladesh sebagai negara merdeka yang lepas dari Pakistan tampaknya telah menjadi saksi gagalnya nasionalisme Muslim di Pakistan. Peristiwa ini juga telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai ideologi Islam di Pakistan. Kedua wilayah tersebut dipisahkan oleh India sejauh 1200 mil. Lihat Harun Nasution and Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), 151.

<sup>9</sup>“Benazir Bhutto, the Muslim World’s First Female Leader,” accessed December 27, 2016, <http://www.nytimes.com/interactive/projects/cp/obituaries/archives/benazir-bhutto>.

<sup>10</sup>Ni'matul Husna, “Hak Politik Perempuan Islam Menurut Benazir Bhutto” (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Sementara itu, menurut Intan Khalizah Sirait,<sup>11</sup> Benazir Bhutto sebagai tokoh politik sekaligus muslim perempuan merupakan tokoh kontroversial. Ia merupakan tokoh yang menempatkan agama sebagai suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari landasan awal berdirinya negara. Sementara perempuan juga dipandang sebagai suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam struktur kehidupan bernegara. Terdapat dua hal penting yang melatarbelakangi munculnya pemikiran Benazir sebagai sosok politisi perempuan, antara lain: *Pertama*, adanya paradigma Islam yang menganggap bahwa Islam merupakan suatu ideologi atau dasar berdirinya suatu negara. *Kedua*, perempuan dianggap memiliki partisipasi yang cukup besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Berangkat dari latar belakang diatas, kajian ini memiliki perspektif berbeda dari berbagai kajian yang ada terkait pemikiran Benazir Bhutto yang menempatkan relasi islam dengan negara atau negara dengan perempuan. Kajian ini memfokuskan pada tema seputar rekonsiliasi Islam dan demokrasi yang merupakan gagasan puncak Benazir Bhutto sebelum meninggal dan merupakan inti dari perjuangannya semasa hidup.

## **DISKURSUS ISLAM DAN DEMOKRASI**

Muslim sebagai umat dan Islam sebagai agama mempunyai prinsip-prinsip politik modern sekaligus ideal. Kesesuaian Islam dan prinsip dasar politik modern itu disandarkan pada doktrin masa awal Islam yang terwujud dalam Piagam Madinah (*sohifah al-madinah*). Dalam konstitusi tersebut, doktrin tentang keadilan (*al-'adl*), egalitarianisme (*al-musawah*), musyawarah (*syura'*) dapat terrealisasikan di dalam praktik politik Negara Madinah yang dinilai modern oleh banyak pakar. Disebut modern karena adanya kontrak sosial (*social contract*), partisipasi dan spirit kemajemukan dari seluruh komunitas politik Madinah. Struktur politik yang dikembangkan juga modern, dalam artian adanya keterbukaan dalam hal penentuan posisi pimpinan yang didasarkan pada prinsip meritokrasi dan tidak bersifat *hereditary* (dinasti). Bentuk kemodernan seperti itulah yang dianggap sebanding dengan kehidupan negara demokratis.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Intan Khalizah Sirait, "Pemikiran Politik Benazir Bhutto tentang Negara dan Perempuan," *Dinamika Politik*", Vol. 2, No. 1 (February 2013).

<sup>12</sup>Mumtaz Ahmad (ed.), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993).

Salah satu hal yang sangat menarik terkait implementasi politik modern dan demokrasi adalah bagaimana mekanisme pengambilan keputusan mengenai hal-hal menyangkut kepentingan bersama. Sementara Nabi SAW sebagai teladan kepala pemerintahan negara Madinah, ternyata mengembangkan pola yang beragam. Termasuk dalam mengembangkan budaya negosiasi (*syura*’; musyawarah) dikalangan para sahabatnya. Beliau, meski juga seorang Rasul berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam persoalan kemasyarakatan. Namun kenyataannya dalam berkonsultasi tersebut, Nabi tidak hanya mengikuti satu pola saja. Terkadang Nabi hanya berkonsultasi dengan para sahabat senior, terkadang hanya berkonsultasi dengan orang-orang yang ahli dalam hal yang di persoalkan. Tetapi tak jarang beliau juga melempar masalah-masalah kepada halayak publik yang lebih besar, khususnya masalah yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.<sup>13</sup>

Terkait hal ini, bagi mayoritas umat Islam, implementasi keadilan, termasuk aturan-aturan syari’ah yang spesifik sebagai program yang lebih penting. Meski selama ini prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan pemerintahan berdasarkan hukum didukung oleh mayoritas besar pemikir politik Islam, baik fundamentalis maupun modernis; namun hanya dalam pengertian yang sangat umum. Sehingga, dalam perkembangan demokrasi modern dan bagaimana hubungannya dengan Islam inilah yang kemudian menjadi diskursus utama dalam perkembangan politik Islam modern.<sup>14</sup>

Namun, dibalik realitas umum ini terdapat fakta yang sederhana tetapi mendasar, yakni bahwa muslim sebagai umat tentunya mempunyai titik tolak yang berbeda dengan Barat. Sehingga Barat seringkali memandang Islam sebagai benturan dalam mewujudkan pembangunan negara modern. Asumsi semacam ini sebenarnya didasarkan pada dua alasan.<sup>15</sup> *Pertama*, masalah konflik kekuasaan. Dewasa ini negara-negara Islam, secara politik dikuasai elite politik sekuler, sehingga mereka mendapat tantangan yang semakin meningkat dari gerakan Islam. Dalam beberapa kasus, gerakan Islam

---

<sup>13</sup>Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet.5 (Jakarta: UI Press, 1993), 16.

<sup>14</sup>Antony Black, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi, 2006), 610.

<sup>15</sup>Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS dan Israel atas Negara- Negara Muslim* (Bandung: Mizan, 2007), 14.

berhasil mengambil alih kekuasaan, namun dalam kasus lain justru bisa berbagi dengan elite sekuler. Lahirnya ISIS di Irak dan Suriah bisa disebut sebagai contoh kasus ini.

*Kedua*, adalah konflik peradaban. Diakui atau tidak, baik dari segi kultur, politik, maupun ekonomi, Barat saat ini mendominasi dunia. Sedangkan peradaban lain dipandang sebagai marjinal. Kebangkitan Islam kemudian dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan peradaban Barat, terutama sesudah runtuhnya komunisme. Dalam situasi seperti itu, kekuatan-kekuatan Islam sekuler di negara-negara Muslim yang ingin mempertahankan eksistensinya kemudian menjalin kepentingan dengan pihak Barat dalam hal menentang validitas oposisi gerakan Islam.

Untuk memahami kondisi itu, memang tidak mudah mencari relevansi antara demokrasi yang notabene produk Barat dan Islam sebagai agama sebagai pegangan ummat. Bagi kelompok masyarakat Islam, terdapat petunjuk yang cukup kuat bahwa sebagian dari para ulama berpandangan bahwa dalam Islam tak ada tempat bagi paham demokrasi. Dengan demikian ada dua problem tentang hubungan agama dan demokrasi:<sup>16</sup> *Pertama*, problem filosofis yakni jika klaim agama terhadap pemeluknya sedemikian total maka akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. *Kedua*, problem historis-sosiologis, ketika kenyataannya peran agama tidak jarang digunakan oleh penguasa untuk mendukung kepentingan politiknya.

Sehingga, dalam perkembangan diskursus modern terdapat pola-pola yang muncul terkait hubungan antara agama (Islam) dan demokrasi sebagai landasan konsepsi. Misalnya hubungan yang cenderung didasarkan atas “paradoks” dan “antagonistik” diantara keduanya, dimana masing-masing berupaya untuk saling “menghancurkan”. Turki pada masa tumbanganya imperium Utsmani 1924, menggambarkan jenis hubungan demikian. Begitupun yang terjadi pada dekade 1980-an, dimana negara cenderung “menafikan” peran agama (Islam) atau setidaknya menjadikan agama (Islam) sebagai “terpinggirkan”, sehingga representasi hubungan antara agama dan demokrasi cenderung bersifat “antagonistik” dan bertentangan. Selain itu, terdapat hubungan yang saling mendukung

---

<sup>16</sup>Abdullah, “Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan,” *Politik Profetik* Volume 4, no. 2 (Tahun 2014): 29.

antara agama dan demokrasi, yang disebut juga teo-demokrasi. Model ini Abdurrahman Wahid menyebutnya sebagai hubungan simbiotik.<sup>17</sup>

Terkait hubungan antar agama dan demokrasi ini, paling tidak terdapat tiga model. *Pertama*, model paradoksal, model ini menyatakan bahwa antara agama dan demokrasi tidak bisa dipertemukan bahkan berlawanan. Di antara faham penganut ini adalah Karl Marx, Max Weber, Nietzsche dan Sartre. Dalam pandangan Karl Marx, tokoh faham komunisme, ekspresi kehidupan beragama pada dasarnya merupakan ekspresi penderitaan sosial. Agama adalah keluh kesah warga masyarakat yang tertindas. Agama adalah sentimen suatu dunia yang tak berperikemanusiaan. Agama adalah candu masyarakat yang hanya memberikan penenang sementara, semu, tetapi tidak mampu membongkar dan menghilangkan kondisi-kondisi yang menimbulkan penderitaan. Senada dengan Karl Max, Nietzsche dan Sartre berpandangan bahwa agama dan para penguasa gereja adalah kekuatan konservatif yang membelenggu penalaran dan kemerdekaan manusia untuk membangun dunia secara otonom tanpa dikekang oleh tangan Tuhan yang hadir melalui kekuasaan lembaga dan penguasa agama. Demokrasi adalah sistem dunia (*empiric-profan*) yang dibuat oleh rakyat berdasarkan kehendak bebas mereka, sedangkan agama merupakan nilai-nilai dan doktrin yang berasal dari Tuhan.<sup>18</sup>

*Kedua*, model sekuler, menyatakan bahwa hubungan agama dengan demokrasi bersifat netral, di mana urusan agama dan politik termasuk masalah demokrasi berjalan sendiri-sendiri.<sup>19</sup> Oleh karena itu, peran agama bagi manusia hanya terbatas pada persoalan hubungan manusia secara pribadi dengan Tuhannya dan pencarian makna hidup dan kehidupan. Sedangkan dalam interaksi sosial, nilai demokrasi seperti dalam kehidupan politik dijadikan sebagai tata krama dan etika sosial. Dan dalam hal ini, agama tidak

---

<sup>17</sup>Ahmad A. Sofyan dan M. Roychan Madjid, *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), 13. Lihat Abdurrahman Wahid, "Relasi Kuasa dan Agama: Perspektif Historis Dan Sosiologis," *SANTRI*, September 1996.

<sup>18</sup>Muhammad Hasbi, "Wacana Demokrasi dalam Pemikiran Politik Islam" (Asyir'ah, 2011), 1145.

<sup>19</sup>Naili Rohmah Iftitah, "Islam dan Demokrasi," *Islamuna* Vol 1, no. 1 (June 2014): 37.

dapat memainkan perannya. Dengan kata lain, dalam lapangan keduniaan, perilaku manusia terbebas dan steril dari ajaran normatif agama. Dalam ungkapan lain dijelaskan bahwa hubungan agama dan politik berjalan sendiri-sendiri atau agama dipisahkan dari politik (sekularisasi politik). Masyarakat modern yang mendukung sekularisasi politik tidak mesti dihakimi sebagai menolak dan anti agama, karena orang modern tetap beragama namun kehadiran agama secara formal institusional dalam politik tidak diterima, karena hal ini seringkali membuat agama mudah dipolitisasi untuk kepentingan politik.

*Ketiga*, model teodemokrasi, menyatakan bahwa agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran dan kesesuaian.<sup>20</sup> Dalam model ketiga ini, agama baik secara teologis dan sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi politik, ekonomi dan kebudayaan sebuah negara. Tentang hal ini, Masyhur Amin dan Muhammad Najib menyatakan bahwa agama sebagai ajaran normatif dalam banyak hal mempunyai singgungan terhadap nilai normatif demokrasi, sehingga interaksi antar keduanya bisa saling mendukung, keberadaan agama dapat menjadi roh sekaligus inspirasi bagi demokratisasi. Banyak ajaran agama yang sangat relevan dengan ajaran demokrasi. Hal itu diindikasikan dengan suatu bukti bahwa kehadiran semua agama dengan misi profetiknya (misi profetik agama antara lain pembebasan, keadilan, dan kedamaian) senantiasa membawa imbas pada perombakan struktur masyarakat yang dicekam oleh kekuasaan yang dispotik, tiranik, zalim dan otoriter menuju terwujudnya struktur dan tatanan masyarakat yang demokratis. Bagi kalangan neo-modernis Islam, model ini dipandang sebagai aturan politik yang paling layak, sementara agama diposisikan sebagai wasit moral dalam pengaplikasian demokrasi.

Sementara itu, para sosiolog teoretis Islam merumuskan teori-teori tentang relasi agama dan demokrasi ini dalam klasifikasi tiga kelompok paradigma dengan istilah yang sedikit berbeda; yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik.<sup>21</sup> Persinggungan antara tiga kelompok ini,

---

<sup>20</sup>A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), 194–96.

<sup>21</sup>Marzuki Wahid and Rumaedi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 23.

kemudian berkembang berabad-abad dalam konteks yang semakin mengglobal. Dalam Islam, al-Qur'an mengakui manusia (*insan*), tanpa memandang keyakinan dan pendirian politiknya, merupakan legitimasi teologis yang demokratis. Tetapi Al-Quran tidak memiliki padanan kata untuk warga negara (*citizen*), demokrasi (*democracy*), dan istilah lain dalam sistem demokrasi Barat.<sup>22</sup> Itulah sebabnya mengapa sebagian kaum muslim modern menciptakan istilah baru untuk konsep-konsep politik kontemporer tersebut. Ditambah lagi belum adanya kesepakatan dikalangan para pemikir dan tokoh Islam tentang hubungan antara Islam dan demokrasi, dan membiarkan umat menafsirkan sendiri sesuai konteks bangsa dan kelompok.

Pola pembangunan bangsa-bangsa modern sepanjang politik dunia Islam, seperti ditulis John L. Esposito,<sup>23</sup> memang memperlihatkan tiga kecenderungan yang serupa atau orientasi yang umumnya ada pada wilayah-wilayah muslim tersebut; pemisahan antara agama dan demokrasi (negara sekuler), Islam memiliki dasar etika bernegara sendiri yang berbeda sama sekali dengan demokrasi Barat (negara Islam), serta Islam dan demokrasi adalah integral (negara muslim). Turki sebagai sisa imperium khilafah justru lebih memilih identitas sekuler. Pakistan sendiri justru mengumumkan ciri Islam bagi dasar sistem politiknya dan mengutamakan pelaksanaan hukum Islam. Meskipun, menggunakan konsep ala Barat pada sebagian sistem politik, sosial dan hukumnya. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa secara teoritis, sejarah yang tengah berjalan di Pakistan saat ini patut dianggap sebagai ranah dialektika antara gejolak-gejolak politik yang terus terjadi.

## **BIOGRAFI POLITIK BENAZIR BHUTTO**

Benazir memiliki nama lengkap Mohtarma Benazir Bhutto (selanjutnya disebut Benazir), lahir pada 21 Juni 1953 M di Kota Karachi, Pakistan. Pakistan memang dikenal sebagai sebuah anak benua di Asia Selatan yang melahirkan banyak ulama, pemikir dan negarawan perempuan kelas dunia. Diantara tokoh-tokoh tersebut adalah Noor Jehan (Kaisar dinasti Moghul pada abad ke-16), Fatimah

---

<sup>22</sup>Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS dan Israel Atas Negara-Negara Muslim*, 21.

<sup>23</sup>John L. Esposito, *Islam Dan Politik*, terj. H. Joesoef Soe'ayb (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 9.

Jinnah (1893–1967), Begum Ra'ana Liaquat Ali Khan (1905–1990), Asma Jilani Jahangir, Hina Jilani.<sup>24</sup>

Ayahnya memberinya nama Benazir, yang dalam bahasa Pakistan berarti 'tak ada duanya'. Benazir adalah anak sulung dari empat bersaudara. Ia dibesarkan di keluarga Islam yang toleran, demokratis dan kaya. Sehingga sejak kecil, meskipun kondisi Pakistan belum stabil, Benazir sudah mendapatkan pendidikan yang layak.<sup>25</sup> Ayahnya adalah Zulfikar Ali Bhutto, seorang pemimpin Pakistan yang terkenal dan berasal dari golongan sunni bermazhab hanafi. Ibunya adalah Begum Nusrat Bhutto, seorang perempuan terpendang keturunan suku Kurdi-Iran, dari golongan Syi'ah. Kakek dari pihak ayah adalah Sir Shah Nawaz Bhutto, seorang Sindhi, tuan tanah dan tokoh penting dalam gerakan kemerdekaan Pakistan.<sup>26</sup>

Benazir kecil telah memperoleh pendidikan yang mapan. Sejak kecil ia bersekolah di Taman Kanak-kanak *Lady Jennings Nursery School*, kemudian melanjutkan tingkat dasar di sekolah perempuan *Convent of Jesus and Mary* di Karachi. Setelah tamat dari sekolah tersebut, Benazir melanjutkan belajarnya di *Rawalpindi Presentation Convent* selama dua tahun, kemudian ia dikirim ke sekolah menengah *Jesus and Mary Convent* di Murree. Ia lulus ujian *O-level* (dalam sistem pendidikan Inggris, setara dengan SMA).<sup>27</sup> Benazir menamatkan sekolah menengahnya dalam usia yang relatif muda, yakni 16 tahun.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup>Bhutto, *Rekonsiliasi: Islam, Demokrasi dan Barat terj. Annisa Rahmalia*, 175. Lihat pula Aini Aryani, "Kontribusi Wanita Pakistan Untuk Bangsanya," June 28, 2016, <http://warnaislam.com/ragam/pakistan/2008/11/15/19200.htm>.

<sup>25</sup>Saudara kandung Benazir terdiri dari empat orang; yaitu Mir Murtaza Bhutto dilahirkan tahun 1954; Sanam Bhutto dilahirkan tahun 1957; dan Shah Nawaz Bhutto dilahirkan tahun 1958. Lihat Katherine M. Doherty and Craig A. Doherty, *Benazir Bhutto* (Franklin Watts, 1996), 23.

<sup>26</sup>Dhurorudin Mashad, *Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996), 5.

<sup>27</sup>Zaenal Ali, *Tragedi Benazir Bhutto* (Yogyakarta: Narasi, 2008), 55.

<sup>28</sup>Karena cara pandang ayahnya yang cenderung sekuler inilah, pola hidup Benazir tidak seperti kebanyakan perempuan muslim di Pakistan, yang jauh dari pendidikan dan pergaulan. Benazir diperkenankan menamatkan pendidikan menengahnya di sekolah-sekolah sekuler. Sehingga tak pelak lagi Benazir pun memiliki teman pergaulan yang luas. Lihat Amir Ahmed Khuhro and Soomro Ali Nawaz, "The Role of Benazir Bhutto in the Movement for the Restoration of Democracy: An Analysis," *International Journal of Social Science and Humanity* Vol. 3, no. 3 (May 2013), 274.

Pada April 1969, oleh ayahnya Benazir dikirim ke Amerika untuk sekolah di *Radcliffe College*, sebuah sekolah khusus wanita dibawah bendera Universitas Harvard.<sup>29</sup> Pada Juni 1973, Benazir lulus dari Harvard dengan gelar BA dalam bidang ilmu politik. Ia juga terpilih sebagai anggota Phi Beta Kappa. Ia kemudian melanjutkan ke Universitas Oxford pada musim gugur 1973 dan lulus dengan predikat *cum laude* dan gelar magister dalam bidang Filsafat, Politik, dan Ekonomi, pada 1976.<sup>30</sup>

Setelah lulus dari Universitas Oxford, Benazir melanjutkan studi hubungan Internasional setelah sebelumnya terpilih menjadi presiden *Oxford Union*, sebuah kelompok debat paling bergengsi di Oxford. Benazir merupakan perempuan Asia pertama sepanjang sejarah yang menjadi pemimpin kelompok debat tersebut. Di kampusnya Benazir dikenal sebagai orator ulung. Karena bakatnya itu, Ia pun langsung menarik perhatian media di seluruh dunia.<sup>31</sup>

Dari perjalanan pendidikannya tersebut, terlihat jelas bahwa lingkungan pendidikan Benazir mengharuskannya mengkompromikan nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut masyarakat, dengan latar belakang bangsanya yang memegang teguh nilai-nilai Islam. Jiwa Benazir kemudian mengalami akulturasi budaya antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai sekular Barat, antara nilai-nilai foedal masyarakat Pakistan dengan nilai-nilai kebebasan masyarakat Barat.

Setelah menyelesaikan studinya di Inggris pada pertengahan 1977, Benazir kembali ke Pakistan yang saat itu sedang terjadi perebutan kekuasaan oleh jenderal Zia Ul-Haq dari tangan ayahnya. Pada Juli 1977 ayahnya ditangkap rezim militer Zia dan dieksekusi hukuman gantung pada 4 April 1979. Tewasnya sang ayah yang sangat mengenaskan itu kendati telah menghancurkan hampir seluruh kebahagiaan diri dan keluarganya, namun tidaklah membuat Benazir larut dalam kesedihan, tetapi justru menjadi titik balik (*turning point*) sekaligus menyadarkannya bahwa arus politik

---

<sup>29</sup>Mashad, *Benazir Bhutto; Profil Politisi Wanita di Dunia Islam*, 9.

<sup>30</sup>Ali, *Tragedi Benazir Bhutto*, 56.

<sup>31</sup>Benazir Bhutto, 54, "Who Weathered Pakistan's Political Storm for 3 Decades, Dies - The New York Times," accessed December 27, 2016, <http://www.nytimes.com/2007/12/28/world/asia/28bhutto.html?module=ConversationPieces&region=Body&action=click&pgtype=article>.

Pakistan sangatlah keras.<sup>32</sup> Dalam hal perubahan sikap Benazir ini, Dhurorudin Mashad menulis,

....kematian Ali Bhutto telah memicu terjadinya resosialisasi pada diri Benazir terhadap kehidupan politik. Mulanya, Benazir tak terlalu suka terlibat dalam urusan politik praktis. Namun setelah terjadi *malaise* sosial politik yang berujung pada kematian sang ayah, akhirnya Benazir berbalik arah menjadi sangat terlibat dalam politik. Benazir yang mulanya hanya seorang gadis manja, akhirnya harus berhadapan dengan kerasnya politik Pakistan.<sup>33</sup>

Benazir kembali ke Pakistan setelah masa pengasingan pada tahun 1984 hingga 1986 berakhir, dan segera menjadi pimpinan sekaligus tokoh penting di PPP yang memposisikan diri sebagai oposisi Presiden Zia. Benazir menjadi ketua seumur hidup hingga meninggalnya pada 27 Desember 2007. Partai ini didirikan pada 30 November 1967 oleh Zulfikar Ali Bhutto. Asas partai ini adalah Islam, dengan visi politiknya adalah demokrasi dan misi ekonominya adalah sosialisme; segala kedaulatan untuk rakyat.<sup>34</sup>

Setelah menjadi pimpinan PPP, kepulangannya ini pula yang akhirnya membuat pengaruh Benazir untuk membangkitkan semangat menentang rezim Zia ul-Haq kian meningkat. Benazir relatif berhasil memanfaatkan wibawa sebagai pewaris nama besar dan kharisma mendiang ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto. Antusiasme massa pendukungnya yang begitu besar dan diamnya pemerintah terhadap kritikan-kritikan Benazir dimanfaatkan secara maksimal oleh Benazir untuk dijadikan langkah awal guna memperjuangkan cita-cita politiknya. Setelah bebas dari penjara, pada 8 Desember 1987, Benazir menikah dengan Asif Ali Zardani di Karachi dan dikarunia tiga orang anak, yaitu Bilawal Bhutto Zardani, Bakhtawar Bhutto Zardani dan Aseefa Bhutto Zardani.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Khuhro and Ali Nawaz, "The Role of Benazir Bhutto in the Movement for the Restoration of Democracy: An Analysis," 274–75.

<sup>33</sup>Mashad, *Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam*, 13–14.

<sup>34</sup>PPP (Partai Rakyat Pakistan; Pakistan People's Party) ialah sebuah partai politik bersayap tengah-kiri di Pakistan yang bergabung dengan badan Sosialis Internasional. Saat ini, PPP dipimpin oleh putra Benazir, yakni Billawal Bhuto Zardani. Lihat "Pakistan Peoples Party an Introduction," Oktober 2016, ,” <http://www.ppp.org.pk/about-party/.html>.

<sup>35</sup>Ali, *Tragedi Benazir Bhutto*, 58.

Pada 1 Desember 1988, Benazir, dalam usia 35 tahun, terpilih sebagai perempuan pertama di dunia Islam yang menjadi perdana menteri. Ia terpilih dua kali sebagai perdana menteri dari tahun 1988 hingga 1990 dan dari 1993 hingga 1996. Tentang kepemimpinan Benazir ini, Gadis Arivia menulis:

Ia layak disebut sebagai pemimpin. Ia disebut seorang pemimpin bukan karena ia ketua organisasi partai politik, orang yang berkuasa, atau anak dari seorang pemimpin sehingga otomatis menjadi pemimpin. Benazir Bhutto lebih dari itu semua. Ia layak disebut sebagai seorang pemimpin karena memiliki gairah untuk menegakkan sebuah masyarakat egaliter meskipun berada di negara patriarki yang mensubordinasi perempuan. Pengalamannya membuatnya semakin teguh, sabar, dan kuat menghadapi segala aspek penindasan.<sup>36</sup>

Pada periode kedua pemerintahannya, yakni Oktober 1993-November 1996, Benazir selalu menyuarakan isu-isu tentang perempuan, kesehatan, pendidikan, dan anti diskriminasi terhadap perempuan. Selama berkuasa Benazir membangun sekolah-sekolah di seluruh negeri, dan listrik pun berhasil dialirkan ke daerah-daerah pedesaan. Namun kembali tersandung skandal korupsi, keliru menerapkan kebijakan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum, pemerintahan Benazir dijatuhkan oleh Presiden Farooq Leghari.<sup>37</sup>

Paska pencopotan ini, Pemerintahan Pakistan di pegang oleh Nawaz Sharif, pada masa inilah Benazir dan suaminya, Asif Ali Zardari, dipenjara hingga 1999. Saat terjadi kudeta oleh Jenderal Pervez Musharraf di tahun 1999, kondisi Benazir tidak mengalami perubahan berarti. Benazir sejak tahun 1999 tinggal dalam pengasingan di Dubai, Uni Emirat Arab, dan di sana ia mengasuh anak-anaknya dan ibunya, yang menderita penyakit *Alzheimer*, dan dari situ ia berkeliling dunia untuk memberikan kuliah dan tetap menjaga hubungannya dengan para pendukung di PPP. Benazir, suami dan ketiga orang anaknya dipersatukan kembali pada Desember 2004. Baru beberapa saat sebelum dilangsungkannya pemilu 2007, dimulailah pembicaraan mengenai kemungkinan kembalinya Benazir ke Pakistan. Musharraf akhirnya memberi amnesti terhadap tuduhan korupsi pada Benazir di masa pemerintahan Nawaz Sharif.

---

<sup>36</sup>Gadis Arivia, "Benazir Bhutto: Melawan Fundamentalisme dan Kediktatoran," Agustus 2016, <http://indonesianmuslim.com/benazir-bhutto-melawan-fundamentalisme-dan-kediktatoran.html>.

<sup>37</sup>Husna, "Hak Politik Perempuan Islam menurut Benazir Bhutto," 28-30.

Pada Kamis, 27 Desember 2007 pukul 18.16 waktu setempat, bersama ratusan pendukungnya seusai kampanye di lapangan *Liaquat National Bagh*, Kota Rawalpindi, Benazir tertembak dan meninggal dunia dalam sebuah insiden. Insiden itu juga disertai pengeboman. Tentang kematian Benazir ini Abdurrahman Wahid menulis, "...keluarga Bhutto adalah keluarga pejuang yang mengorbankan dirinya sendiri bagi kepentingan bangsanya ....Ia mewarisi tradisi yang mulia, mengorbankan segala-galanya bagi kepentingan menegakkan demokrasi."<sup>38</sup>

### **REKONSILIASI ISLAM DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF BENAZIR BHUTTO**

Peta politik Pakistan sejak awal berdirinya memang selalu dipenuhi oleh berbagai kemelut dan intrik, bahkan hingga hari ini. Kekerasan politik dan politik kekerasan terus mewarnai spektrum politik negeri itu, sehingga stabilitas politik selalu terganggu yang tak jarang berujung pada campur tangan militer dalam kancah politik. Bahkan sampai kini, Pakistan telah beberapa kali diperintah oleh rezim militer. Pertama, oleh Ayub Khan (1958-1969), lalu Yahya Khan (1969-1971), Zia ul-Haq (1977-1988), berikutnya terakhir Pervez Musaraf (1999-2008).

Kelompok sipil harus terus berhadapan dengan militer di ranah politik. Realitas politik yang demikian keras inilah kemudian mempengaruhi cara pandang (*mindset*) Benazir tentang Politik demokrasi di Pakistan. Latar belakang keluarga yang sejak kecil melibatkannya dalam kehidupan politik, dididik dengan pendidikan ala Barat, kematian ayahnya yang tragis di panggung politik, membentuk karakter pemikirannya melalui jalan hidup yang Ia alami. Sosialisasi politik yang secara tidak langsung diberikan ayahnya melalui berbagai aktifitas politik ketika ayahnya berkuasa juga turut mempengaruhi cara berfikir Benazir.

Sebagaimana kebanyakan para pemimpin dalam sebuah negara yang sedang bergejolak, kerasnya iklim politik membawa Benazir juga melalui tahapan-tahapan dalam perkembangan pemikirannya yang sangat fluktuatif. Hingga pada akhirnya Ia berhasil mengemukakan suatu penafsiran rekonsiliasi Islam dan politik

---

<sup>38</sup>Abdurrahman Wahid, "In Memoriam Benazir Bhutto," July 2, 2016, <http://www.jawabali.com>.

demokrasi, yang menurut keyakinannya dapat memberikan solusi bagi proses demokratisasi di dunia Islam, khususnya di Pakistan dimana Ia dilahirkan. Serta problem-problem global dewasa ini. Karena, sebagaimana diungkapkan oleh Charles C. Adams, aktivitas-aktivitas seseorang merupakan komentar yang paling baik atas pandangan-pandangannya.<sup>39</sup>

Pemikiran Benazir secara lebih jauh pada dasarnya memberikan penyadaran kepada semua umat Islam bahwa, tradisi Islam sangat memungkinkan bagi penganutnya untuk memperjuangkan hak-hak politik dan hak asasi manusia. Menurut Benazir, Islam sebagai agama sejatinya telah memberikan referensi yang jelas terhadap manusia untuk memerintah di bumi, sebagaimana yang tertuang dalam kitab suci al-Qur'an. Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menurutnya menggambarkan prinsip-prinsip politik Islam, atau secara implisit menampilkan sebagai ciri pemerintahan demokratis, semisal dalam ayat berikut.<sup>40</sup>

﴿ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنتُمْ تَأْوِيلًا ۗ ﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Ayat diatas menurut Benazir secara jelas merupakan landasan politik yang kuat yang memerintahkan umat Islam untuk mematuhi pemimpinnya, sebagai sebuah kewenangan manusia di bumi. Demikian pula dalam hal pemerintahan yang demokratis, karena pemerintahan yang demokratis adalah bagian dari sistem nilai Islam yang membuktikan kesalahan mitos bahwa Islam dan demokrasi saling bertentangan. Tentang hal ini Benazir menyatakan bahwa Islam memerintahkan agar persoalan-persoalan kaum muslimin ditanggulangi melalui *syurâ* (musyawarah) atau konsultasi timbal

<sup>39</sup>C. C. Adams, *Islam and Modersm in Egypt* (London: Oxford University Press, 1993), 3.

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007), al-Nisâ': 59.

balik antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin.<sup>41</sup> Nilai dan etika dalam bentuk syura ini telah dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Demikian pula dengan kebebasan berpendapat dan kritik yang konstruktif kepada pemerintah, Islam sangat menganjurkan.<sup>42</sup> Menurut Benazir, konsep musyawarah tidak sebatas meminta opini elite masyarakat, tetapi secara luas menandai penolakan terhadap otokrasi, pemerintahan yang diktator, ataupun opresi.

Jika dicermati lebih mendalam, gagasan diatas dalam konteks pemikiran Benazir dalam memandang rekonsiliasi Islam dan demokrasi, tentu tampak bahwa Benazir menyandarkan pemahamannya terhadap kitab suci al-Qur'an yang tidak semata-mata hanya melihat teks saja tetapi dikaitkan dengan konteks teks tersebut. Sehingga, kendatipun Benazir tidak menyatakan secara gamblang pendapatnya mengenai Islam dan negara, pemikiran Benazir ini termasuk corak pemikiran yang menekankan pentingnya manifestasi dari substansi atau makna ketimbang aspek formalistik dan tekstual keberagamaan.

Dalam konteks perkembangan relasi Islam dan demokrasi dewasa ini, tampaknya Benazir mengupayakan rekonsiliasi yang sebenarnya telah dirintis oleh tokoh-tokoh Islam diberbagai belahan dunia. Karena, selama ini bagi banyak kalangan di Barat, Islam kerap kali menjadi ancaman ketika dikaitkan dengan kekerasan dan ekstremisme agama disatu sisi, dan resistensi gerakan-gerakan Islam terhadap penetrasi Budaya Barat, di sisi lain.<sup>43</sup> Selain itu, terdapat kontradiksi internal dalam Islam sendiri mengenai sistem demokrasi, hak asasi manusia, peran wanita di masyarakat, penghargaan terhadap agama dan budaya lain, teknologi, dan modernitas. Dengan mengupayakan jalan tersebut, di masa depan Islam dapat membentuk kekuatan sentral kemanusiaan. Karena, hanya melalui dua ketegangan ini sebenarnya, upaya rekonsiliasi untuk mencegah benturan peradaban dapat terwujud—yang dipercaya sebagian orang sedang membayangi seluruh dunia. Sehingga, Barat dan Islam dapat dijembatani oleh upaya itu.

---

<sup>41</sup>Bhutto, *Rekonsiliasi, Islam, Demokrasi dan Barat*, 79–81.

<sup>42</sup>Lukman Santoso Az, "Pergumulan Islam dan Demokrasi di Pakistan," *Kompas*, n.d., 14 Agustus 2009 edition.

<sup>43</sup>Mun'im A. Sirry, "Benturan Kesalah Pahaman Islam-Barat," in *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2005), 195.

Pengalaman Islam pada zaman modern, yang begitu ironis tentang hubungan antara Islam dan politik kerap kali dilambungkan oleh sikap yang saling menuduh dan menilai pihak lainnya sebagai “kafir” atau “musyrik”, sehingga patut untuk diperangi, sebagaimana banyak diyakini kalangan fundamentalis dan ekstremis merupakan akar polemik yang berkepanjangan.<sup>44</sup> Sehingga, pemahaman yang sempit dan keliru itu, tampaknya patut diluruskan. Tentang hal ini Benazir menegaskan,

Islam adalah agama yang terbuka, pluralistik, dan toleran, sebuah kekuatan positif dalam kehidupan lebih dari 1 milyar manusia diseluruh dunia, termasuk jutaan populasi Islam yang terus bertambah di Eropa dan AS. Islam adalah agama yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokratis (*syura*); membangun konsensus (*ijma'*); yang akhirnya mengarah pada penilaian sendiri (*ijtihad*).<sup>45</sup>

Dari pernyataan itu dapat dipahami bahwa pemahaman Benazir terhadap masyarakat muslim awal, telah menerapkan konsep yang kontekstual, yakni pemerintahan yang berkuasa mengambil petunjuk dan ide dasar dari Islam dan kemudian menerapkannya pada konteks sejarah mereka, mengembangkan sistem budaya, dan sosial-ekonomi, merupakan cermin dari masyarakat yang moderat. Umat Muslim modern bisa melakukan hal serupa dalam masyarakatnya. Sama seperti orang Kristen modern yang tidak ingin mengulang kembali Abad kegelapan, umat Muslim modern dapat menggunakan al-Qur'an sebagai pedoman hidup dimasa kini yang demokratis.

Banyak ahli berpendapat bahwa, Islam sebagai agama mengandung lebih banyak unsur demokratis; pluralisme dan keadilan, dibanding agama-agama lain dan sebenarnya merupakan lahan yang lebih subur bagi sistem demokrasi.<sup>46</sup> Konsep kebebasan berfikir, juga berlaku dalam kebebasan memilih sistem politik dan bentuk pemerintahan. Rakyat harus diberi kebebasan untuk memilih pemerintahan dan hukum-hukum mereka. Sementara kitab suci tetap konstan dan sakral, interpretasi harus berkembang sesuai zaman berdasarkan perubahan lingkungan sosial dan politik.

---

<sup>44</sup>Budhy Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Cet.2 (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), 588–89.

<sup>45</sup>Bhutto, *Rekonsiliasi, Islam, Demokrasi dan Barat*, 20.

<sup>46</sup>Sirait, “Pemikiran Politik Benazir Bhutto tentang Negara dan Perempuan,” 4.

Salah satu hal penting dalam konteks ini menurut Benazir, al-Qur'an memberi kewenangan kepada manusia untuk bermusyawarah. Konsep *syura* (musyawarah) dalam al-Qur'an secara eksplisit sebenarnya memerintahkan Rasul untuk bertanya kepada orang yang beliau pimpin serta memimpin rakyat dengan proses musyawarah dan konsensus. Teks tersebut secara jelas memerintahkan manusia untuk lebih mengedepankan musyawarah dalam berbagai urusan duniawi, termasuk politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Tentang hal ini Benazir mengatakan:

Pemerintahan demokratis memungkinkan rakyat untuk menyuarakan pendapat mereka. Meskipun demikian, sering kali opini tidak hanya satu, melainkan banyak. Bagian dari pemerintahan demokratis tidak saja memungkinkan mayoritas untuk memerintah, tetapi juga menyediakan ruang untuk oposisi yang sah dan resmi... Oposisi yang berkembang dan efektif melekat disemua partai dalam sebuah sistem yang menyepakati hal-hal mendasar, aturan main, konstitusi, serta metode pemerintahan dan perubahan rezim.<sup>47</sup>

Dalam konteks Pakistan sebagai negara Islam, menurut Benazir prinsip demokrasi sebenarnya telah menjadi impian bapak bangsa Quaid-e-Azam Ali Jinnah, namun hal itu baru dapat dilaksanakan di bawah konstitusi Pakistan dan disahkan secara aklamasi oleh Parlemen Pakistan pada tahun 1973, sehingga hak pemerintahan muslim yang demokratis diakui dalam konstitusi ini. Benazir yakin, meski sejak awal Pakistan bernama negara Islam, namun semangat yang hendak di wujudkan oleh para bapak bangsa adalah semangat demokratis di dunia Islam.<sup>48</sup>

Tentang strategi untuk melakukan rekonsiliasi di dunia Islam dan demokrasi, tampaknya Benazir juga sinergis sekaligus mengamini sejumlah cendekiawan muslim, diantaranya, KH Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid (1946-2005), Muhammad Khalid Mas'ud (Pakistan), Muhammad Arkoun (Aljazair), Wahiduddin Khan (India).<sup>49</sup>

Karena itu, dalam konteks rekonsiliasi ini Benazir tidak hanya bicara tentang Islam dengan kacamata yang kritis, tetapi

---

<sup>47</sup>Bhutto, *Rekonsiliasi, Islam, Demokrasi dan Barat*, 80.

<sup>48</sup>Sani H. Panhwar, *Benazir Bhutto: Selected Speeches From 1989-2007* (Member Sindh Council: PPP, 2009), 549.

<sup>49</sup>Bhutto, *Rekonsiliasi, Islam, Demokrasi dan Barat*, 73-76-309.

juga menuntut dunia Barat menghapuskan stigma negatif tentang Islam sekaligus mengagendakan upaya menghentikan gelombang radikalisme Islam serta menemukan kembali nilai-nilai toleransi dan keadilan yang ada dalam Islam. Ada dua hal sebenarnya, yang dituntut Benazir harus dilakukan Barat untuk mengupayakan rekonsiliasi ini. *Pertama*, Barat harus melihat kedalam tradisi Islam dan menentukan sejauh mana persepsi muslim tentang Barat bisa dibenarkan, atau paling tidak bisa dipahami. *Kedua*, Barat harus membuka diri dalam mempertimbangkan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk menjembatani perbedaan mendalam antara masyarakat dan kebudayaan.

Sehingga, dalam argumentasi dan pemikirannya tersebut, pemikiran Benazir dapat dikategorikan dalam model simbiotik atau teodemokrasi yang memaknai hubungan keduanya secara substantif. Hal ini berdasarkan temuan kajian ini yang dapat dijabarkan melalui beberapa point argumentasi berikut. *Pertama*, Islam memandang persoalan hidup sebenarnya hanya pada *level* ajaran etisnya saja, yang berakar doktrin bahwa segala perbuatan manusia harus semata hanya demi ridla-Nya. Inilah dasar paham bahwa Islam tidak memisahkan antara kegiatan “profan” dan kegiatan “sakral”, namun jelas tetap membedakan antara keduanya, terutama dalam cara pendekatannya.

*Kedua*, bidang politik, seperti juga banyak bidang yang lain, sesungguhnya dipandang Islam hanya secara garis besar, dan rasanya memang tidak perlu, memberi ketentuan terperinci. Hal ini mengingat pentingnya dibiarkan adanya ruang gerak secukupnya dalam sistem paham kaum Muslim untuk mengakomodasikan tuntutan-tuntutan khusus ruang dan waktu. *Ketiga*, perincian praktis bidang politik itu, terwujud oleh perkembangan sejarah, dan tumbuh sebagai hasil kegiatan intelektual kemanusiaan. Merupakan tanggungjawab Para pemikir Muslim untuk memberi kejelasan mana hal-hal yang parametris dan mana pula yang merupakan variabel historis.

*Keempat*, politik bukanlah bagian dari syari’ah yang sempit, tapi berdiri berdampingan dengannya. Ia lebih mendekati filsafat, dengan dinamika wataknya sendiri. *Kelima*, Islam bukanlah dan tidak bisa disebut sebagai sebuah ideologi atau teori, seperti banyak dikatakan para pemikir Muslim apologetik. Sebab sebagai agama atau *al-din*, Islam ini adalah suatu pengajaran yang bersifat Ilahi (wahyu), yang harus diterima dan dipertahankan.

*Keenam*, Posisi sebenarnya Islam di bidang politik, menurut Benazir, berada pada sekitar pertengahan antara dua pendapat ekstrim yang berlawanan: ‘Ali ‘Abdul al-Raziq di satu pihak, dan Sayyid Quthb dan Maududi di pihak lain. *Ketujuh*, dalam bidang politik, umat Islam dibenarkan mencontoh siapa dan dari mana saja, biar pun bukan Muslim, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.

Melalui gagasannya mengupayakan rekonsiliasi Islam dan demokrasi ala Barat ditengah fundamentalisme global, Benazir berupaya membalikkan semua miskonsepsi dan stigma negatif tentang Islam dalam pandangan Barat.<sup>50</sup> Ia tidak hanya memberikan pemahaman tentang politik Islam dan bagaimana memperjuangkan tegaknya demokrasi di negara dengan mayoritas muslim, tetapi juga tentang memberikan pemahaman yang benar tentang maraknya ektremisme dan terorisme yang mengatasnamakan Islam. Dalam konteks Indonesia, pemikiran politik Benazir ini semakin menemukan relevansinya ketika dihadapkan pada perkembangan geo-politik Indonesia beberapa tahun terakhir yang marak dengan aksi terorisme dan fundamentalisme.

Gagasan Benazir tentang rekonsiliasi Islam dan demokrasi, yang mengetengahkan toleransi dan kemajemukan juga memiliki muara yang sama terhadap gagasan dan upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan tokoh-tokoh Islam moderat Indonesia, seperti Said Aqil Siraj, Abdurrahman Wahid, Munawir Sjadzali, Amin Rais, Syafi’i Ma’arif, Din Syamsuddin, dan beberapa tokoh moderat lain, meskipun memiliki varian, *lokus* dan *tempus* yang berbeda.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam kajian diatas, maka terdapat beberapa kesimpulan. *Pertama*, Kemelut politik Pakistan yang tak berkesudahan, latar belakang keluarga yang sejak kecil melibatkannya dalam kehidupan politik, serta dasar pendidikan politik yang ditempuh, menjadi sosialisasi politik bagi Benazir Bhutto untuk kemudian menumbuhkan dan melahirkan pemikiran yang unik, yang mendasarkan pertimbangannya pada aspek substantif pemaknaan rekonsiliasi Islam dan politik demokrasi di Pakistan sebagai negara Islam.

---

<sup>50</sup>Humaini AS, “Belajar Pada Rekonsiliasi Benazir,” *Suara Merdeka*, n.d., 08 Februari 2009 edition.

*Kedua*, dengan pemikirannya yang bercorak simbiotik atau teodemokrasi dan tergolong bertentangan dengan mayoritas muslim Pakistan (tradisionalis dan fundamentalis) ini, Benazir memiliki kontribusi dalam ranah wacana politik Pakistan. Kontribusi terbesar Benazir, selain keseriusannya terhadap wacana rekonsiliasi Islam dan demokrasi adalah membawa perubahan politik di Pakistan dalam memulihkan hak-hak kaum sipil yang sebelumnya dibungkam di bawah rezim militer. Kehadiran Benazir dalam panggung politik Pakistan, juga menjadi simbol lahirnya gelombang emansipasi wanita dan demokratisasi di negara Islam.

*Ketiga*, dalam konteks Indonesia, dengan pandangannya ini, Benazir sebenarnya ingin mengatakan bahwa gagasannya selaras dengan eksistensi, artikulasi, dan manifestasi nilai-nilai Islam yang instrinsik dalam iklim politik negara-bangsa lebih penting untuk dilakukan, sekaligus amat kondusif bagi upaya pengembangan nilai Islam dalam sosok kulturalisasi masyarakat dan dunia Islam modern. Sedangkan dari pemahaman yang lebih umum, gagasan Benazir ini adalah *counter* wacana terhadap pemikiran yang mengidealkan bahwa Islam harus menjadi sebuah sistem politik. Pemikiran Benazir ini selaras dengan paradigma Islam yang melihat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang sistem politik yang harus diselenggarakan oleh umatnya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah. "Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan." *Politik Profetik* Volume 4, no. 2 (Tahun 2014).
- Adams, C. C. *Islam and Modersm in Egypt*. London: Oxford University Press, 1993.
- Ahmad, Mumtaz (ed.). *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Ali, A. Mukti. *Alam Pikiran India Dan Pakistan*. Cet. 3, Bandung: Mizan, 1996.
- Ali, Zaenal. *Tragedi Benazir Bhutto*. Yogyakarta: Narasi, 2008.

- Amal, Taufik Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan, 1989.
- Arivia, Gadis. "Benazir Bhutto: Melawan Fundamentalisme dan Kediktatoran," Agustus 2016. <http://indonesianmuslim.com/benazir-bhutto-melawan-fundamentalisme-dan-kediktatoran.html>.
- Aryani, Aini. "Kontribusi Wanita Pakistan Untuk Bangsaanya," June 28, 2016. <http://warnaislam.com/ragam/pakistan/2008/11/15/19200.htm>.
- AS, Humaini. "Belajar Pada Rekonsiliasi Benazir,," *Suara Merdeka*, n.d., 08 Februari 2009 edition.
- Ayres, Robert U. *Turning Point: The End of the Growth Paradigm*. Publishers: James & James, 1998.
- "Benazir Bhutto, 54, Who Weathered Pakistan's Political Storm for 3 Decades, Dies - The New York Times." Accessed December 27, 2016. <http://www.nytimes.com/2007/12/28/world/asia/28bhutto.html?module=ConversationPieces&region=Body&action=click&pgtype=article>.
- "Benazir Bhutto, the Muslim World's First Female Leader." Accessed December 27, 2016. <http://www.nytimes.com/interactive/projects/cp/obituaries/archives/benazir-bhutto>.
- Bhutto, Benazir. *Rekonsiliasi, Islam, Demokrasi Dan Barat*. terj. Annisa Rahmalia. Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2008.
- Black, Antony. *Pemikiran Politik Islam, dari Masa Nabi hingga Masa Kini*. terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007.
- Doherty, Katherine M., and Craig A. Doherty. *Benazir Bhutto*. Franklin Watts, 1996.
- Esposito, John L. *Islam dan Politik*. terj. H. Joesoef Soe'ayb. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Husna, Ni'matul. "Hak Politik Perempuan Islam menurut Benazir Bhutto." Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.

- Iftitah, Naili Rohmah. "Islam dan Demokrasi." *Islamuna* Vol 1, no. 1 (June 2014).
- Khuhro, Amir Ahmed, and Soomro Ali Nawaz. "The Role of Benazir Bhutto in the Movement for the Restoration of Democracy: An Analysis." *International Journal of Social Science and Humanity* Vol. 3, no. 3 (May 2013).
- Mashad, Dhurorudin. *Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam*. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996.
- Muhammad Hasbi. "Wacana Demokrasi dalam Pemikiran Politik Islam." *Asy Syir'ah*, 2011.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Cet.9. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Nasution, Harun, and Azyumardi Azra. *Perkembangan Modern dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- "Pakistan Peoples Party an Introduction," Oktober 2016. ,” dalam <http://www.ppp.org.pk/about-party/.html>.
- Panhwar, Sani H. *Benazir Bhutto: Selected Speeches From 1989-2007*. Member Sindh Council: PPP, 2009.
- Rachman, Budhy Munawar. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Cet.2. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.
- Santoso Az, Lukman. "Pergumulan Islam dan Demokrasi di Pakistan." *Kompas*. n.d., 14 Agustus 2009 edition.
- Sihbudi, Riza. *Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS dan Israel atas Negara- Negara Muslim*. Bandung: Mizan, 2007.
- Sirait, Intan Khalizah. "Pemikiran Politik Benazir Bhutto tentang Negara dan Perempuan,," *Dinamika Politik* Vol. 2, no. 1 (February 2013).
- Sirry, Mun'im A. "Benturan Kesalah Pahaman Islam-Barat." In *Islam, Negara dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 2005.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Cet.5. Jakarta: UI Press, 1993.

Ubaidillah, A. *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

Wahid, Abdurrahman. "In Memoriam Benazir Bhutto," July 2, 2016. <http://www.jawabali.com>.

Wahid, Abdurrahman. "Relasi Kuasa dan Agama: Perspektif Historis dan Sosiologis." *SANTRI*, September 1996.

Wahid, Marzuki, and Rumaidi. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

